

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Fandi R Sarwo Edi, Metode penelitian kualitatif, Depok, Rajawali pers, 2016, hal 35.
- H. Salim dan Ernis Septiana, Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis, Depok, Rajawali Pers, 2017.
- John M. Echlos dan Hasan Saidi, Kamus Inggris Indonesia, jakarta, Gramedia Utama.
- Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Friedman Lawrence, 1990, Harvard Univercity Perss, Yogyakarta
- Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, Kamus besar bahasa indonesia, Jakarta, Grasia, 2012.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983, Rajawali Press, Jakarta,
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian hukum normatif dan hukum empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady, Metode Riset Hukum, pendekatan teori dan konsep, Depok, Rajawali pers, 2018.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, Hukum Islam, Sinar Grafika,

Jakarta, hlm. 89.

Putera Astomo, Ilmu Perundang-undangan, Teori dan praktek di Indonesia, Depok, Raja Grafindo Persada, 2018.

Sugiyono, Metode penelitian kualitatif R & D, Bandung, Alfabeta, 2012.

Wisnu Wisnu dkk, Tol Laut, Konektivitas Poros Maritim Dunia, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, 2020

Martono dan Budi, 2015, Transportasi di Perairan berdasarkan Undang-undang nomor. 17 tahun 2008, Rajawali Perss, Jakarta.

Esmi Warassih, 2017, Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Thafa Media, Yogyakarta.

Susi Pujiastuti dkk, 2015, Upaya mewujudkan Indonesia sebagai Poros maritim Dunia, Pesatuan Pensiunan Perwira Angkatan Laut (PPAL), Jakarta.

Till Geoffry, 2012, Maritime Power / Sea Power.

Muchtrudin Siregar, 2012, Beberapa masalah ekonomi dan manajemen transportasi, lembaga penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, hlm.5.

Ninik Suparni, S.H., 2000, KUHD dan Kepailitan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Husen Umar, 2001, Hukum Maritim dan Masalah-masalah Pelayaran Indonesia, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Win Pudji Pamularso, 2009, Tubrukan kapal pertamina dengan Elixir di perairan Jakarta, Masalah hukum dan Penyelesaiannya, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

BATEMAN, S. 2003. Coast guards: New Forces for Regional Order and Security, in Asia Pacific Issues No. 65, January 2003. East-West Center: 1- 13.

DJALAL, H. 2004. Piracy in South East Asia: Indonesia and Regional Responses. Paper prepared for Strategic and International Studies-American Pacific Seanes Security Institute Conference on Maritime Security in Asia. January 18-20, 2004, Honolulu, Hawaii :1-11.

B. JURNAL

Sri Mas Sari, tanggal 20 Agustus 2019, Ternyata ada 18 Instansi penegak hukum di laut, INSA perlu badan tunggal, <https://ekonomi.bisnis.com> diakses 29 Desember 2022.

Didik Heru Purnomo, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Desember 2004,

Bernard Kent Sondakh, Pengamanan Wilayah Laut Indonesia, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus, 2004,

Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara,

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, AsosiasiPeneliti Hukum Indonesia, Vol 01 N0. 2, 1998,

Rinaldi Muhammad Azka, tanggal 20 Agustus 2019, Ada 18 Instansi penegak hukum di laut, jadi tumpang tindih, Saut Gurning, <https://ekonomi.bisnis.com>, diakses 29 Desember 2022.

Theresa Sandra Desfika, tanggal 12 Mei 2020, INSA keluhkan maraknya penangkapan kapal Indonesia di laut sendiri, <https://www.beritasatu.com>, diakses 29 Desember 2022.

Hesti dan Sri Kusriyah, 1 Maret 2021, Owners Responsibilities of Vehicles used as illegal Public Transport When Traffic Accidents Happened, *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 4, March 2021.

Amin Purnawan, 12 Maret 2012, Rekonstruksi Sitem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 11, Maret 2012.

Subekhan dan Hanim, 12 April 2020, Criminal Responsibility on Captain of Commercial Vessel by Act. 17 of 2008, on Voyage, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1, March 2020.

Rully Trie Prasetyo; Umar Maruf; Anis Mashudoratun, 2017, Tindak Pidana Koorporasi dalam perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidanan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12, no. 4, Desember. <https://ejurnal.uki.ac.id>. Penegakan hukum di Indonesia, Mei 2017, di akses 29 Desember 2022.

Menko Maritim, 12 Desember 2019, Armada Kapal Patroli Laut, Sea and Coast Guard, junalmaritim.com, diakses 10 Januari 2023

Sri, 2 April 2020, Kapal Republik Indonesia, <https://p2k.unkris.ac.id>, diakses 5 November 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/maritim>

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-negara-maritim->

menurut-para-ahli/

Kolonel Laut (P) Antonius Widoutomo, S.H Kepala Pusat Olah Yudha Sekolah Staf dan Komando TNI AL pada 23 rd Asia Pacific Naval College Seminar 2020 di Tokyo Jepang Tanggal 25 Februari 2020.

Christian Bueger, "What Is Maritime Security," Jurnal Maritime, Vol.1. No.1., Januari 2015,

Prima Tegar Anugerah, "Maritime Domain Awareness Concept", Jurnal Keamanan Maritim, Vol.2. No.1., November 2017

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2010 tentang angkutan di perairan.

Kementerian Perhubungan, PM. nomor. 171 tahun 2015 tentang tata cara pelayanan Kapal wisata Yacht Asing

Kementerian Perhubungan, 1998, Keputusan Menteri Perhubungan, No. ini KM.70, tentang Pengawakan Kapal Niaga.